DESKRIPSI PEMEKARAN WILAYAH DESA FAJAR AGUNG BARAT KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017

(Skripsi)

Oleh

IDRIS AFFANDI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

DESKRIPSI PEMEKARAN WILAYAH DESA FAJAR AGUNG BARAT KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017

Oleh:

IDRIS AFFANDI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemekaran wilayah Desa Fajar Agung Barat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tahun 2012, dengan titik tekan kajiannya adalah faktor-faktor yang menunjang pemekaran Desa Fajar Agung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik tabel persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jumlah penduduk berjumlah 2.390 jiwa. (2) Luas Desa Fajar Agung Barat 1,97 km^2. (3) Batas Desa Fajar Agung Barat dengan desa sekitarnya telah diwujudkan dalam bentuk batas buatan. (4) Prasarana desa yang tersedia adalah prasarana pendidikan, prasarana keamanan, prasarana kesehatan, prasarana ibadah, prasarana transportasi, dan prasarana olahraga. (5) Potensi desa merupakan desa berpotensi tinggi, karena terdapat di daerah dengan lahan pertanian subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis.

Kata kunci : deskripsi, pemekaran, wilayah

ABSTRACT

THE DESCRIPTION OF AREA EXPANSION WEST FAJAR AGUNG VILLAGE SUB-DISTRICT PRINGSEWU REGENCY PRINGSEWU 2017

By:

IDRIS AFFANDI

This research was purposed to examine the area expansion Village West Fajar Agung in Sub-district Pringsewu Regency Pringsewu 2012, with the emphasis of the study being the factors that support the expansion of the West Fajar Agung Village. The method used in this research is descriptive method. Data collection used technique is done by observation, interview, and documentation. Data analysis using percentage table technique. The results showed: (1) The population is 2.390 inhabitants. (2) Area of the West Fajar Agung Village 1,97 square kilometers. (3) The boundary of the West Fajar Agung Village with its surrounding villages has been manifested in the form of an artificial boundary. (4) Available village infrastructure is education infrastructure, security infrastructure, health infrastructure, religious infrastructure, transportation infrastructure, and sports infrastructure. (5) Potential villages are high potential villages, as they occur in areas with fertile agricultural land, flat topography, and are equipped with technical irrigation.

Keywords : description, development, region

DESKRIPSI PEMEKARAN WILAYAH DESA FAJAR AGUNG BARAT KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017

Oleh

IDRIS AFFANDI

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Penddikan Geografi

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**DESKRIPSI PEMEKARAN WILAYAH DESA FAJAR AGUNG BARAT KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017**
Nama Mahasiswa	:	Idris Affandi
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1313034044
Jurusan	:	Pendidikan IPS
Program Studi	:	Pendidikan Geografi
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Drs. Edy Haryono, M.Si.	**Dra. Nani Suwarni, M.Si.**
NIP 19571218 198603 1 002	NIP. 19570912 198503 2 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Ketua Program Studi Pendidikan Geografi
Drs. Zulkarnain, M.Si.	**Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.**
NIP 19600111 198703 1 001	NIP 19570725 198503 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Drs. Edy Haryono, M.Si.** .....

   Sekretaris : **Dra. Nani Suwarni, M.Si.** .....

   Penguji

   Bukan Pembimbing : **Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.** .....

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Hi. Muhammad Fuad, M. Hum.
NIP 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 November 2017**

PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISIWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Idris Affandi
NPM	: 1313034044
Program Studi	: Pendidikan Geografi
Jurusan/Fakultas	: Pendidikan IPS/KIP
Alamat	: Kelurahan Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Desember 2017

Yang menyatakan,

Idris Affandi
NPM. 1313034044

RIWAYAT HIDUP

Idris Affandi dilahirkan di Kenanga II Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada tanggal 10 Juni 1995 yang merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Putra dari pasangan Bapak Sugiyono dan Ibu Marsiyam. Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah III Pringsewu tamat pada tahun 2001, Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Pringsewu tamat pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Pringsewu tamat pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pagelaran tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013, diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) Program Studi Pendidikan Geografi melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

MOTO

“Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

(Idris Affandi)

PERSEMBAHAN

Kepada Ayahanda dan Ibunda Tersayang

Almamater yang kubanggakan Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu'alaikum wr. wb

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Deskripsi Pemekaran Wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan, arahan, pemikiran, saran, nasehat, dan kesabaran dari Bapak Drs. Edy Haryono, M.Si. selaku pembimbing utama sekaligus sebagai Pembimbing Akademik (PA) dan Ibu Dra. Nani Suwarni, M.Si. selaku pembimbing pembantu, serta Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurahman, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakulatas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Edy Haryono, M.Si., selaku pembimbing utama sekaligus pembimbing akademik atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Nani Suwarni, M.Si., selaku pembimbing kedua atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik pada proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku penguji utama atas bimbingan, saran, dan kritik yang membangun dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
11. Bapak Nanang Pri Utomo selaku Kepala Desa Fajar Agung Barat yang telah mengizinkan dalam penelitian ini.

12. Sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2013 Program Studi Pendidikan Geografi serta kakak dan adik tingkat yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2017
Penulis,

Idris Affandi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Ruang Lingkup Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
A. Tinjauan Pustaka 11
1. Geografi 11
2. Pemekaran Wilayah 14
3. Tujuan Pemekaran Daerah 14
4. Otonomi Daerah 16
5. Otonomi Desa 17
6. Faktor-Faktor Pemekaran Desa 18
B. Penelitian Relevan 26
C. Kerangka Pikir 27

BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian 29
B. Populasi dan Sampel 29
1. Populasi 29
2. Sampel 30
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 31
1. Variabel 31
2. Definisi Operasional Variabel 31
D. Teknik Pengumpulan Data 33
1. Teknik Observasi 33
2. Teknik Wawancara Berstruktur 34
3. Teknik Dokumentasi 34
E. Teknik Analisis Data 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 36
1. Sejarah Desa Fajar Agung Barat 36
2. Visi dan Misi 37

B. Keadaan Fisik Daerah Penelitian 38
1. Letak Lokasi 38
2. Keadaan Topografi 39
3. Keadaan Iklim 42
4. Jenis Tanah 46
C. Keadaan Sosial Daerah Penelitian..... 49
1. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya 49
2. Komposisi Penduduk..... 50
D. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan 57
1. Umur Responden 57
2. Jenis Pekerjaan 58
3. Jumlah Penduduk..... 59
4. Luas Wilayah Desa..... 62
5. Batas Wilayah Desa..... 67
6. Prasarana Desa..... 71
7. Potensi Desa 74
E. Pembahasan..... 77

BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan..... 88
B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN..... 93

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Jumlah Responden Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 30
2. Hubungan Antara Relief dan Kemiringan Lereng 40
3. Klasifikasi dan Kriteria Kemiringan Lereng..... 40
4. Data Curah Hujan di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2007-2016 44
5. Penggolongan Tipe Iklim Menurut Sistem Schmidt-Ferguson..... 45
6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017..... 51
7. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017..... 53
8. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2016..... 54
9. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 55
10. Komposisi Penduduk Berdasarkan Etnis di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 56
11. Umur Responden di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 57
12. Jenis Pekerjaan di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 59
13. Persebaran Jumlah Penduduk Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 60
14. Luas Lahan Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017..... 62
15. Luas Wilayah Desa Fajar Agung dan Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 63
16. Batas Wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 67

17. Kondisi Jalan Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 71
18. Potensi Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017..... 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir Penelitian 28
2. Peta Topografi Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 41
3. Diagram Batas Besar Nilai Q Curah Hujan di Kecamatan Pringsewu menurut Schmidt-Ferguson..... 46
4. Peta Jenis Tanah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 47
5. Peta Persebaran Jumlah Penduduk Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 61
6. Peta Sebelum Pemekaran Wilayah Desa Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 64
7. Peta Pemekaran Wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 65
8. Peta Sesudah Pemekaran Wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 66
9. Bentuk Batas Desa Fajar Agung Barat 68
10. Peta Batas Wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 70
11. Peta Prasarana Umum Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 73
12. Potensi di Desa Fajar Agung Barat 75
13. Peta Potensi Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017..... 76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks otonomi daerah dapat dipahami bahwa pembentukan daerah melalui pemekaran daerah diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Penambahan daerah otonom ini merupakan fenomena yang layak dikaji ulang. Sebab, pemekaran atau penambahan daerah otonom yang banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia sekarang ini tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, akibatnya yang terjadi adalah tersendatnya roda pemerintahan daerah dan carut-marutnya tata pemerintahan.

Seiring dengan perjalanan waktu, suatu keadaan dapat mengalami perubahan. Perubahan yang dialami oleh masyarakat berawal dari dorongan bahwa kehidupan yang dirasa belum memenuhi tuntutannya. Salah satu tuntutan yang ingin dipenuhi adalah pelayanan, dengan pelayanan yang maksimal maka kehidupan masyarakat dapat berjalan secara selaras dengan harapan. Pemenuhan pelayanan ini dapat berupa sistem dan mekanismenya. Sehingga untuk mendekatkan, mempermudah, dan menjamin tercapainya layanan tersebut, suatu wilayah dapat memekarkan menjadi sebuah desa/pekon baru. Pemekaran desa yang dilakukan sebagai akibat dari adanya otonomi daerah yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah.

Pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat, agar lebih efisien dan efektif. Hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil suatu komunitas pemerintahan negara. Pada pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 berisi bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia (Ma’ruf, 2006:2).

Pasca adanya otonomi daerah, setiap daerah pada dasarnya dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi di mana setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Pembangunan pun seharusnya didasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri sehingga efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai,

dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkret yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah berdasarkan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat:

1. Jumlah penduduk, yaitu:
   a. wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
   b. wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan
   c. wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
2. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan; dan
5. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia (Ma'ruf, 2006:2).

Masalah yang paling utama dalam pemekaran Desa Fajar Agung Barat adalah jumlah penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Apabila jumlah penduduk di suatu desa sedikit, dapat menimbulkan masalah dalam keberlangsungan perkembangan desa. Selain itu, jumlah penduduk yang berpusat pada bagian wilayah tertentu, sehingga terjadi ketimpangaan wilayah desa. Manusia yang menempati wilayah desa hendaknya dapat memanfaatkan potensi desa secara efektif dan berdaya guna untuk keberlangsungan hidup mereka.

Luas wilayah merupakan hal yang penting dalam pemekaran wilayah, karena semakin luas wilayah maka akan semakin sulit mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, sehingga tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Alasan pemekaran Desa Fajar Agung Barat karena luasnya wilayah desa yang menyebabkan keterlambatan informasi. Wilayah yang luas juga membuat masyarakat kesulitan karena menempuh jarak lebih jauh untuk mengurus pembuatan berbagai dokumen yang diproses melalui kantor desa. Pemekaran wilayah dilakukan dalam upaya untuk lebih mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pemekaran wilayah ada hal yang harus dipenuhi, salah satunya adalah batas wilayah. Batas wilayah merupakan salah satu unsur utama dalam suatu daerah, sebagai penanda antara satu desa dengan desa yang lain. Suatu wilayah harus memiliki garis batas wilayah yang jelas. Garis batas wilayah merupakan faktor penting sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan instrumen dan persyaratan pemekaran daerah terutama dalam mengantisipasi timbulnya konflik antar desa. Seperti yang kita tahu bahwa batas wilayah mempunyai dampak penting dan memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah pembangunan di bidang fisik dan sosial. Hal Ini dapat diwujudkan melalui perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada. Infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur sangat penting, guna meningkatkan

kelancaran produktivitas sektor produksi dan berperan sebagai pendukung dalam menciptakan dan meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih diperhatikan khususnya pada Desa Fajar Agung Barat yang masih sangat minim kondisi sarana dan prasarana, seperti halnya prasarana jalan yang merupakan akses utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan tidak layak karena jalan yang ada hanya sebatas jalan tanah yang kondisinya sulit dilalui terlebih jika musim penghujan tiba. Hal ini tentunya sangat menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitasnya.

Belum merata dan seimbangnya pembangunan prasarana pelayanan masyarakat ke seluruh bagian desa. Pembangunan fisik merupakan wujud dari pembangunan desa, akan tetapi prasarana desa masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka dana merupakan faktor dasar dalam meningkatkan pembangunan desa.

Selain itu, sektor pertanian merupakan salah satu potensi unggulan yang memberi kontribusi besar terhadap perekonomian warga masyarakat Desa Fajar Agung Barat. Hal ini didukung oleh keberadaan lahan cukup luas. Sistem pengolahan sawah yang dilakukan oleh petani pada umumnya masih secara tradisional. Meskipun belum sepenuhnya menggunakan teknologi modern. Disisi lain kepemilikan alat tersebut memang belum dimiliki oleh petani. Namun sebagian petani Desa Fajar Agung Barat, hanya menyewa yaitu membayar ongkos alat (*hand tracktor*) tersebut. Dengan demikian, jika sawah petani sudah memanfaatkan teknologi tersebut, akan berpengaruh pada peningkatan hasil.

Faktor lain yang menjadi alasan pembentukan desa baru adalah kesamaan pemikiran atau pandangan tokoh masyarakat dan warga dalam menentukan suatu keputusan. Aspirasi masyarakat ditampung melalui musyawarah yang sudah dilaksanakan, keinginan masyarakat untuk memekarkan atau melepaskan diri dari induk merupakan salah satu aspirasi masyarakat, kemudian direalisasikan oleh para petinggi desa demi kesejahteraan bersama.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk usaha memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Sebelumnya Desa Fajar Agung Barat termasuk desa yang tergabung dengan Desa Fajar Agung. Desa Fajar Agung Barat resmi menjadi desa baru pada tahun 2012, memiliki luas wilayah 1,97 km^2 dengan penduduk berjumlah 2.181 jiwa (Monografi Desa Tahun 2012).

Desa Fajar Agung Barat merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang memiliki luas wilayah yang cukup untuk melakukan pemekaran, dengan topografi wilayah yang keseluruhannya adalah dataran dengan tekstur tanah yang cukup subur, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Luas wilayah Desa Fajar Agung Barat tersebut membuat masyarakat yang terletak di bagian Dusun Pager Gunung I, Dusun Pager Gunung II, dan Dusun Pager Sari untuk membentuk daerah otonomi desa baru dalam rangka mengatur dan mengurus wilayah dan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain alasan luas wilayah

tersebut tentu terdapat beberapa faktor pendukung untuk membentuk daerah otonom baru yaitu jumlah penduduk dan memiliki garis batas wilayah yang jelas.

Sebelum dimekarkan Desa Fajar Agung memiliki luas wilayah 4,05 km^2 yang terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Padang Suryo, Dusun Padang Asri, Dusun Sampang, Dusun Pager Gunung I, Dusun Pager Gunung II, dan Dusun Pager Sari. Setelah melakukan pemekaran, Dusun Pager Gunung I, Dusun Pager Gunung II, dan Dusun Pager Sari merupakan bagian yang tergabung di Desa Fajar Agung Barat.

Desa Fajar Agung Barat dimekarkan membentuk desa baru karena telah memenuhi kriteria pemekaran yang telah ditentukan dan dinilai memiliki potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Dikembangkannya daerah baru yang otonom melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Potensi yang dimiliki Desa Fajar Agung Barat adalah area persawahan dengan komoditas unggulannya yaitu padi dan jagung. Selain itu, potensi yang dikembangkan berupa komoditas perikanan yang dibudiyakan oleh masyarakat dengan cara pembuatan kolam-kolam ikan. Berlandaskan pada pertimbangan potensi di atas, maka muncul berbagai aspirasi masyarakat untuk menjadikan Desa Fajar Agung Barat sebagai desa baru guna memanfaatkan potensi yang ada agar tercapai perkembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Potensi desa yang ada di Desa Fajar Agung Barat dianggap cukup mendukung pemenuhan kebutuhan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat ditinjau dari ketersediaan lahan dan pengolahannya. Lahan yang dimaksud adalah persawahan dan budidaya ikan sebagai upaya meningkatkan potensi yang ada. Jika kondisi potensi tersebut dikembangkan dan diolah lebih intensif, dengan demikian akan mampu menopang perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pemekaran Desa Fajar Agung Barat ini sebagai satu solusi dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga kesenjangan dapat segera diatasi dan diharapkan masyarakat dalam desa yang baru dibentuk beranjak dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan asumsi jika kondisi yang lebih baik ini disertai pola pengembangan dan pembangunan maksimal dan merata akan menciptakan tatanan pemerintah desa menuju masyarakat yang berkesejahteraan dan mewujudkan ketahanan diberbagai bidang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mendeskripsikan pemekaran wilayah Desa Fajar Agung Barat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, batas wilayah desa, sarana dan prasarana, serta potensi desa di Desa Fajar Agung Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pemekaran suatu wilayah. Maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa jumlah penduduk Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan?
2. Berapa luas wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan?
3. Apakah yang menjadi batas wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan?
4. Apa saja prasarana yang tersedia di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan?
5. Bagaimana potensi desa yang ada di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui jumlah penduduk Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan.
2. Mengetahui luas wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan.
3. Mengetahui yang menjadi batas wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan.

4. Mengetahui prasarana yang tersedia di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan.
5. Mengetahui potensi desa yang ada di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu setelah dimekarkan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2) Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perguruan tinggi dan menambah wawasan yang berhubungan dengan Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah.
3) Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang pengembangan suatu daerah pada waktu dan tempat yang berbeda.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1) Ruang lingkup objek penelitian yaitu setelah pemekaran wilayah Desa Fajar Agung Barat.
2) Ruang lingkup subyek penelitian yaitu tokoh masyarakat.
3) Ruang lingkup tempat penelitian adalah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
4) Ruang lingkup waktu penelitian yaitu tahun 2017.

5) Ruang lingkup ilmu yaitu Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah.

Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah (GPPW) merupakan cabang ilmu geografi yang memadukan Ilmu Geografi dengan Ilmu Perencanaan Wilayah yang mempelajari/mengkaji mengenai keterkaitan antara proses pembangunan yang dilakukan sesuatu region dengan keadaan alam serta penduduk tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri (2004: 12) bahwa:

> Perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.

Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah dijadikan sebagai ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini karena salah satu kajiannya adalah proses pembangunan dan pemekaran wilayah.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Geografi

Menurut Sumadi (2010:17) geografi merupakan ungkapan atau kata dari bahasa Inggris "*geography*" yang terdiri dari dua kata yaitu geo yang berarti bumi dan *graphy* (dalam bahasa Yunani *graphein*) yang berarti pencitraan, pelukisan, atau deskripsi. Jadi dalam arti katanya geografi adalah pencitraan, pelukisan, atau deskripsi tentang keadaan bumi. Senada dengan hal tersebut, Budiyono (2003:3) mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan unsur-unsur fisisnya, dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan kehidupan dan aktifitas manusia.

Menurut Bintarto (1977:54) geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, regional. Selanjutnya, IGI (Ikatan Geografi Indonesia) dalam Budiyono (2003:3) sepakat merumuskan definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan.

Geografi dapat ditafsirkan sebagai ilmu mengenai bumi dan segala sesuatu yang berada di dalamnya, baik yang bersifat fisik dan nonfisik di mana manusia sangat berpengaruh penting dengan keadaan alam di permukaan bumi. Manusia akan terus beradaptasi dengan alam selama manusia tersebut masih mampu dan menjangkaunya demi memenuhi kesejahteraan hidupnya. Uraian tersebut, mengindikasikan adanya serangkaian kegiatan gejala kehidupan manusia pada wilayah tertentu di permukaan bumi, seperti akivitas di bidang pertanian, perdagangan atau kegiatan industri.

Studi geografi pada dasarnya memiliki tiga pendekatan seperti yang dikemukakan dalam Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1979:12) bahwa geografi terpadu (*intergrated geography*) untuk mendekati atau menghampiri masalah dalam geografi digunakan berbagai macam pendekatan atau hampiran (*approach*) yaitu pendekatan analisis keruangan (*spatial analysis*), analisis ekologi (*ecological analysis*), dan analisis kompleks wilayah (*regional complex analysis*).

Dari ketiga pendekatan tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan keruangan, karena penelitian ini hanya mendeskripsikan tentang aspek-aspek geografis pada pemekaran wilayah Desa Fajar Agung Barat. Berkaitan dengan analisis keruangan, Sujali (1989:4) mengemukakan:

> Pendekatan geografi yang mendasar pada aspek keruangan mempunyai kaitan erat dengan persebaran suatu objek pembahasan dan secara umum pendekatan geografi dapat dilakukan dengan melihat unsur letak, batas, bentuk, maupun luas sehingga kajian tentang perkembangan wilayah dapat dijadikan objek penelitian geografi karena terdapat hubungan pemikiran tata ruang, lingkungan serta waktu dimana aneka bentuk pola kehidupan dan penghidupan manusia tergantung pada potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing.

2. Pemekaran Wilayah

Di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi kata yang tak asing lagi bagi kita. Kata itu sudah sering kita dengar dalam keseharian kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah pemekaran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 dinyatakan:

> Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan (Bambang Kesowo, 2004:9).

Pembentukan desa berupa pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 21 tahun 2011 bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat:

a. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
c. Batas pekon yang dinyatakan dalam bentuk peta pekon;
d. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan pekon dan perhubungan; dan
e. Potensi pekon yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia (Sudarno Eddi, 2011:3).

3. Tujuan Pemekaran Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 diuraikan bahwa:

> Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui:
> a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
> b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;

c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah (Djohan Effendi, 2000:2).

Menurut Rasyid Pambudi (2003:61) menjelaskan bahwa jika pemekaran wilayah dilakukan, maka kebijakan itu harus memberi jaminan bahwa aparatur pemerintah yang ada harus memiliki kemampuan yang cukup untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan.

Di samping itu pemekaran wilayah juga harus mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dikatakan Koswara (2002:25) dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan harus didasarkan pada:

a. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah harus selaras dan sesuai, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tetap dengan konsep lingkungan, kerja yang ideal, dengan ukuran organisasi dan jumlah instansi yang terjamin.
b. Pengembangan wilayah pemerintahan atau pemekaran daerah bertolak dari pertimbangan atas prospek pengembangan ekonomi yang layak dilakukan berdasarkan kewenangan yang akan diletakan pada pemerintahan yang baru.
c. Kebijakan pengembangan wilayah harus menjamin bahwa aparatur pemerintahan di daerah yang dibentuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan mendorong lahirnya kebijakan yang konsisten mendukung kualitas pelayanan publik.

Selajutnya Khairullah dan Cahyadin (2006:20) mengemukakan bahwa pemekaran daerah baru pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumberdaya harus seimbang antara satu dengan yang lain.

Pemekaran daerah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran wilayah diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mengsejahterakan masyarakat.

4. Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Sujamto (1991:3) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian daerah otonom mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 sebagai berikut:

a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Bambang Kesowo, 2004:5).

Adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut maka dimulailah babak baru pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

5. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

> Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus-urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bambang Kesowo, 2004:4).

Sutoro Eko (2005:13) mengemukakan bahwa konteks penting yang mendorong desentralisasi dan otonomi desa adalah:

a. Secara historis desa telah lama eksis di Indonesia sebagai kesatuan masyarakat hukum dan *self-governing community* yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam,
b. Lebih dari 60% penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa,
c. Dari sisi ekonomi-politik, desa memiliki tanah dan penduduk selalu menjadi medan tempur antara negara, kapital dan masyarakat,
d. Konstitusi maupun regulasi negara memang telah memberikan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*self-governing community*), tetapi pengakuan ini lebih bersifat simbolik-formalistik ketimbang substantif, dan

e. Selama lima tahun terakhir desa tengah bergolak menuntut desentralisasi dan otonomi.

Sumardjan (1996:5) mengemukakan bahwa desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Sumber penghasilan desa adalah pada tanah,
b. Teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah,
c. Tata hidup dan sosial berkembang untuk sosial subsistence (keperluan sosial sendiri),
d. Sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur, dan
e. Tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat.

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan. Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis dan memberi pelayanan publik yang cepat serta membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa.

6. Faktor-Faktor Pemekaran Desa

Proses pemekaran tidak akan berjalan tanpa memperhatikan faktor-faktor penunjang dan harus memperhatikan syarat-syarat guna menunjang pemekaran di suatu wilayah. Pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah tertentu dan tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Robinson Tarigan (2012:185) menyatakan bahwa:

> Penduduk merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Jumlah penduduk adalah faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah.

Pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa, syarat jumlah penduduk yang harus dipenuhi untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga (Ma'ruf, 2006:2).

Bintarto (1989:18) keadaan penduduk dan dasar hidup masyarakat desa yang berbeda mengakibatkan adanya berbagai karakteristik dan berbagai tingkat kemajuan desa, yaitu:

1) Desa yang kurang berkembang atau terbelakang
2) Desa yang sedang berkembang
3) Desa berkembang atau desa maju.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah adalah keseluruhan luas lahan di suatu wilayah desa. Bintarto (1977:134) lahan dapat diartikan sebagai *land settlement* yaitu

suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama, di mana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidupnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sitanala Arsyad (1989:207) mengemukakan bahwa penggunaan lahan adalah suatu bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual.

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Hanafiah dalam Robinson Tarigan (2012:112) menyatakan bahwa wilayah dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut.

Menurut Mulyanto (2008:1) unsur-unsur wilayah, yaitu:

1) Ruang berupa bentangan geografi dengan batas-batas jelas berupa infrastruktur di dalamnya dengan udara di atasnya sesuai yang diakui secara hukum yang berlaku.
2) Sumberdaya adalah kekayaan-kekayaan yang ada dalam wilayah itu yang dapat menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk melakukan pengembangan wilayah itu yaitu: sumberdaya manusia (SDM), dan sumberdaya alam (SDA) lain misalnya sumberdaya air, kandungan mineral, minyak, dan lain-lain.
3) Pelaksana administrasi/pemerintah: yang sah atau legimitate sesuai hukum yang berlaku dan bertugas melakukan pengaturan yang diperlukan bagi kelangsungan eksistensi wilayah itu.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2006:86) penggolongan/klasifikasi desa berdasarkan luas wilayah, diantaranya:

1) Desa terkecil, luasnya wilayah kurang dari 2 km^2
2) Desa kecil, luasnya wilayah antara 2 km^2 – 4 km^2

3) Desa sedang, luasnya wilayah antara 4 km^2 – 6 km^2
4) Desa besar, luasnya wilayah antara 6 km^2 – 8 km^2
5) Desa terbesar, luasnya wilayah antara 8 km^2 – 10 km^2

Luasnya wilayah mempengaruhi rentang kendali pemerintahan desa. Taliziduhu Ndraha (1991:45) mengemukakan bahwa salah satu alasan untuk memekarkan desa adalah rentang kendali pemerintahan, artinya dengan pemekaran desa diharapkan kondisi wilayah desa yang baru mampu dikontrol oleh aparat pemerintahan desa.

c. Batas Wilayah Desa

Batas wilayah desa sebaiknya memiliki batas-batas wilayah yang jelas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam pasal 1 menjelaskan bahwa:

> Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa. Sedangkan batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa (Sigit Pudjianto, 2016:4).

Garis batas wilayah merupakan faktor penting sebagai pertimbangan dalam penyempurnaan instrumen dan persyaratan pemekaran daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penegasan Batas Daerah bahwa:

> Penegasan batas daerah di darat diwujudkan malalui tahapan:
> 1) Penelitian dokumen;

2) Pelacakan batas;
3) Pemasangan pilar batas;
4) Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas;
5) Pembuatan peta batas.

Tahapan penegasan batas daerah dilakukan dengan prinsip geodesi dan setiap tahapan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Penelitian dokumen meliputi: peraturan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan dokumen yang telah disepakati oleh daerah yang bersangkutan (Ma'ruf, 2006:2).

d. Sarana dan Prasarana

Menurut Moenir (1992:119) sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sedangkan Soepartono (2000:4) mengemukakan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha atau pembangunan). Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau dapat membantu terselenggaranya kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Rahardjo Adisasmita (2006:123) sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, dan sarana pemerintah desa. Sarana pembangunan menurut Rahardjo Adisasmita (2006:102) mencakup:

> Fasilitas pelayanan ekonomi (pasar, terminal, sarana angkut, bank, koperasi, dan lainnya) dan fasilitas sosial (fasilitas pendidikan seperti sekolah dan fasilitas kesehatan misalnya Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik Keluarga, dan lainnya). Sedangkan prasarana pembangunan meliputi ketersediaan jaringan jalan dan irigasi.

Tersedianya sarana dan prasarana desa tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 dalam Lutfi Muta'ali (2013:77) menyebutkan bahwa sarana dan prasarana desa meliputi:

1) Sarana dan prasarana pendidikan
2) Sarana dan prasarana keamanan dan kesehatan
3) Sarana dan prasarana peribadatan
4) Sarana dan prasarana transportasi
5) Sarana dan prasarana olahraga
6) Sarana dan prasarana pemerintahan

Pembangunan di suatu daerah sangat erat kaitannya dengan adanya fasilitas pendukung yang dapat memudahkan aktivitas warga dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial. Ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana sangat penting guna menunjang kelancaran dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara umum permasalahan-permasalahan yang erat kaitannya dengan pembangunan desa menurut Bintarto (1989:26) dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

1) Dari segi pemerintahan desanya, struktur dan aparatur masih selalu perlu ditingkatkan, dan demikian pula pemantapan di bidang koordinasi pelayanan pemerintah yang dilaksanakan oleh berbagai unsur aparat vertikal dan daerah, dan sebagainya.
2) Dari segi geografisnya, keadaan lingkungan beberapa daerah pedesaan yang masih kurang memenuhi persyaratan sebagai lingkungan yang sehat sedangkan teknologi yang dimiliki justru dapat membahayakan lingkungan hidup sekelilingnya. Demikian pula kehidupan yang timpang antara desa dan kota sebagai akibat adanya urbanisasi telah menimbulkan berbagai permasalahan sanitasi pemukiman di bawah standar.
3) Dari segi kelembagaan, perlu adanya peningkatan organisasi yang selalu dipantau secara teratur demi ketertiban dan kelancaran fungsinya.

Rahardjo Adisasmita (2006:5) mengemukakan bahwa dalam pembangunan pedesaan dihadapi banyak sekali hambatan diantaranya yang paling mendesak yaitu:

1) Memperkecil kesenjangan (ketimpangan) antara desa dan kota, dan antar pelaku pembangunan
2) Merubah pola pembangunan dan pendekatan yang bersifat sentralistik dan sektoral menjadi terdesentralisasi, holistik, dan partisipatif
3) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) aparat dan masyarakat untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan pedesaan
4) Meningkatkan pembangunan prasarana fisik dan penyebarannya yang mampu menjangkau ke berbagai pelosok.

e. Potensi Desa

Potensi desa adalah segala sumber alam dan sumber manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa. Menurut Suparmini dan Agustina Tri Wijayanti (2015:50) potensi desa ditentukan oleh potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peluang ekonomi akibat posisi dan interaksi dengan wilayah lain. Pemanfaatan sumberdaya alam tercermin oleh pemanfaatan lahan dan struktur mata pencaharian masyarakatnya.

Eva Banowati (2012:1) mengemukakan bahwa letak setiap wilayah di permukaan bumi, merupakan tata geografis seluruh kondisi lingkungan geografis yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi yang dimilikinya. Lutfi Muta’ali (2013:75) menegaskan bahwa semakin besar potensi desa, maka semakin besar tingkat perkembangan desa. Namun, potensi desa yang besar tidak menjamin perkembangan desa yang baik apabila pengelolaan potensi tidak dilakukan dengan maksimal.

Menurut Bintarto (1989:17) desa mempunyai potensi fisik dan potensi nonfisik.

a. Potensi fisik desa meliputi:
   1) Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
   2) Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
   3) Iklim yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
   4) Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makanan dan sumber keuangan.
   5) Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

b. Potensi non fisik desa meliputi:
   1) Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong-royong dan merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
   2) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
   3) Aparatur atau pamong desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 menyebutkan bahwa potensi wilayah desa, meliputi:

a. Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat di daerah dengan lahan pertanian subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis. Kemampuan wilayah untuk berkembang lebih besar.
b. Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat di daerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis. Wilayah ini masih cukup mempunyai kemampuan untuk berkembang.
c. Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat di daerah lahan pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan), sumber air bergantung pada curah hujan. Wilayah ini sulit untuk berkembang. (Ma'ruf, 2007:7).

Potensi desa mendasarkan pada kondisi fisik, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, maka desa akan berkembang dan memiliki fungsi bagi daerah lain.

B. Penelitian Relevan

Jepri Rison Wardana (2015) tentang deskripsi faktor-faktor yang mendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan menguraikan faktor-faktor yang mendukung pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemekaran wilayah Pekon Tambahrejo Barat adalah faktor pendukung yang meliputi terpenuhinya unsur-unsur syarat pemekaran wilayah, derasnya aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pemekaran wilayah.

Siswan Hadi (2013) tentang deskripsi pemekaran wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Variabel yang diteliti adalah syarat teknis pemekaran wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria persyaratan pemekaran wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kriteria pemekaran memenuhi standar persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah seperti luas wilayah, jumlah penduduk yang ada, sarana pembangunan yang keseluruhan sudah memadai, dan rentang kendali yang menjadi lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Namun ada juga faktor yang masih kurang memadai seperti keadaan ekonomi yang belum didukung dengan sarana ekonomi yang memadai misalnya jumlah pasar dan bank.

C. Kerangka Pikir

Secara geografis tiap-tiap desa memiliki potensi yang berbeda berdasarkan letak dan keadaan lingkungan alamnya. Potensi desa merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah desa. Sebuah desa dapat dikembangkan dengan cara dimekarkan apabila memiliki potensi yang mendukung. Desa Fajar Agung Barat mekar pada tahun 2012, pemekaran Desa Fajar Agung Barat tentu disertai alasan, karena terdapat permasalahan yang terjadi di desa sebelum dimekarkan seperti luasnya wilayah desa yang menyebabkan keterlambatan informasi, jumlah penduduk yang berpusat pada bagian wilayah tertentu, sehingga terjadi ketimpangaan wilayah desa, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana desa, kurang jelasnya batas desa, dan kurang berkembangnya potensi desa. Semua masalah tersebut menyebabkan kurangnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran Desa Fajar Agung Barat tidak terlepas dari faktor pendukung yang menguatkan untuk memekarkan desa. Faktor-faktor pendukung syarat pemekaran desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 21 tahun 2011. Faktor-faktor tersebut yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, batas wilayah desa, prasarana desa, dan potensi desa. Maka, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemekaran wilayah Desa Fajar Agung Barat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017. Untuk mempermudah pemahaman dari uraian di atas dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut:

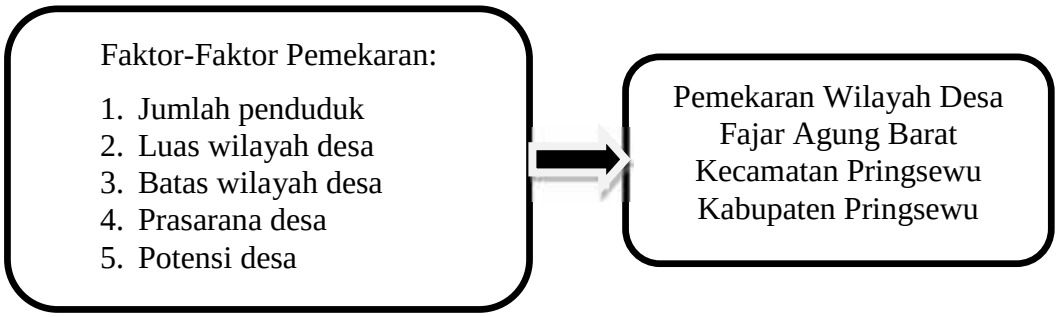

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian sehingga mencapai hasil penelitian yang tepat pada arah yang ditujukan membutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nawawi (2001:63) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, metode penelitian deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti mengenai pemekaran wilayah Desa Fajar Agung Barat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut pendapat Nawawi (2001:141) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang tinggal di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

2. Sampel

Menurut pendapat Etta dan Sopiah (2010:186) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* yaitu tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang pemekaran Desa Fajar Agung Barat dengan menggunakan teknik sampling kuota. Menurut Sugiyono (2012:126) menyatakan bahwa sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Setiap dusun diambil tiga orang responden, untuk lebih jelasnya mengenai sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Responden Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017

No.	Dusun	Jabatan	Banyaknya
1.	I	Sekretaris Desa	1
2.	I	Kepala Dusun	1
3.	I	Kepala Urusan	1
4.	II	Kepala Dusun	1
5.	II	Kepala Urusan	1
6.	II	Tokoh Masyarakat	1
7.	III	Kepala Dusun	1
8.	III	Kepala Urusan	1
9.	III	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah			9

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2017

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

Menurut Suryabrata (2012:25) variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Senada hal tersebut, Sugiyono (2012:38) mengemukakan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat di atas, variabel dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, luas wilayah desa, batas wilayah desa, prasarana desa dan potensi desa.

2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Suryabrata (2012:29) definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diidentifikasi yang dapat diamati (diobservasi). Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini mengenai deskripsi pemekaran wilayah Desa Fajar Agung Barat yang mengacu pada faktor-faktor pemekaran wilayah desa adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh warga yang bertempat tinggal di Desa Fajar Agung Barat yang telah menetap.

   Indikator jumlah penduduk:

   1) Berdomisili : menetap dan memiliki tanda kependudukan
   2) Tidak berdomisili : menetap dan tidak memiliki tanda kependudukan

b. Luas wilayah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas keseluruhan wilayah Desa Fajar Agung Barat yang dinyatakan dalam satuan kilometer persegi.

   Indikator luas wilayah:

   1) Desa terkecil, luasnya wilayah kurang dari 2 km^2
   2) Desa kecil, luasnya wilayah antara 2 km^2 – 4 km^2
   3) Desa sedang, luasnya wilayah antara 4 km^2 – 6 km^2
   4) Desa besar, luasnya wilayah antara 6 km^2 – 8 km^2
   5) Desa terbesar, luasnya wilayah antara 8 km^2 – 10 km^2

c. Batas wilayah desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas wilayah Desa Fajar Agung Barat berbatasan dengan desa-desa yang ada di sekitarnya, yaitu di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur dan sebelah barat.

   Indikator batas wilayah desa:

   1) Batas alam mempunyai unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
   2) Batas buatan mempunyai unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

d. Prasarana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketersediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang dan memberi kemudahan bagi masyarakat Desa Fajar Agung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Indikator prasarana desa:

1) Baik : bagus, terawat dan dapat difungsikan
2) Kurang baik : kurang bagus, tidak terawat dan tidak dapat difungsikan

e. Potensi desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya yang dimiliki Desa Fajar Agung Barat yang dapat digunakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah akan memengaruhi perkembangan wilayah tersebut.

   Berdasarkan potensi wilayah desa digolongkan menjadi tiga:

   1) Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat di daerah dengan lahan pertanian subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis. Kemampuan wilayah untuk berkembang lebih besar.
   2) Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat di daerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis. Wilayah ini masih cukup mempunyai kemampuan untuk berkembang.
   3) Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat di daerah lahan pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan), sumber air bergantung pada curah hujan. Wilayah ini sulit untuk berkembang.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Pabundu Tika (2005:44) mengemukakan bahwa observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan

secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap lokasi untuk memperoleh data batas wilayah desa, prasarana desa dan potensi desa yang ada di Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

2. Teknik Wawancara Berstruktur

Wawancara menurut Nasution dalam Pabundu Tika (2005: 49) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Sedangkan wawancara berstruktur adalah wawancara yang terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan untuk responden. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang ada di lapangan tentang deskripsi pemekaran wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan alat yaitu berupa kuesioner.

3. Teknik Dokumentasi

Suharsimi Arikunto (2010:274) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat legger, agenda dan sebagainya. Mengumpulkan data dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang dicari berupa catatan dokumen tertulis yang sudah ada baik dari arsip maupun dari buku. Teknik dokumentasi ini untuk memperoleh data jumlah penduduk, luas wilayah desa, batas wilayah desa, prasarana desa dan potensi desa yang terdapat di

Monografi Desa Fajar Agung Barat di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Effendi, S. dkk (1989:263) analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tabel dalam bentuk persentase. Data yang diperoleh dari responden maupun hasil dokumentasi dianalisis secara analisis tabel dalam bentuk persentase. Selanjutnya hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis sebagai laporan hasil penelitian dan ditarik kesimpulan sebagai laporan akhir penelitian dengan rumus persentase berikut ini:

$$\% = \frac{n}{N} \text{ x } 100$$

Keterangan:

% = persentase yang diperoleh

n = jumlah jawaban yang diperoleh

N = jumlah responden (Moh. Nazir, 2003: 366).

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan disimpulkan bahwa wilayah Desa Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah memenuhi syarat pemekaran yang meliputi:

1. Jumlah penduduk yang ada di Desa Fajar Agung Barat berjumlah 2.390 jiwa.
2. Luas wilayah Desa Fajar Agung Barat 1,97 km^2.
3. Batas wilayah Desa Fajar Agung Barat dengan desa sekitarnya telah diwujudkan dalam bentuk batas buatan. Bentuk batas di sebelah Utara berupa jalan raya kabupaten, sebelah Selatan berupa tugu/gapura semen, sebelah Barat berupa patok semen, dan sebelah Timur berupa patok semen.
4. Prasarana Desa Fajar Agung Barat yang tersedia setelah pemekaran yaitu prasarana pendidikan, prasarana keamanan, prasarana kesehatan, prasarana ibadah, prasarana transportasi, dan prasarana olahraga.
5. Potensi desa yang terdapat di Desa Fajar Agung Barat merupakan wilayah desa berpotensi tinggi, karena terdapat di daerah dengan lahan pertanian subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis. Kemampuan

wilayah untuk berkembang lebih besar. Potensi desa yang dikembangkan berupa pertanian (persawahan) dan perikanan (kolam ikan).

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan hal-hal berikut:

1. Diharapkan kepada warga masyarakat Desa Fajar Agung Barat setelah memekarkan wilayah, hendaknya lebih bekerja keras untuk mengembangkan potensi desa agar kesejahteraan dapat dicapai/ditingkatkan.
2. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Fajar Agung Barat disarankan untuk tetap mempertahankan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Kesowo. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004*. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Bintarto. 1977. *Geografi Sosial*. U.P. Spring. Yogyakarta.

_____. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Bintarto, R. dan Surastopo Hadisumarno. 1979. *Metode Analisis Geografi*. LP3ES. Jakarta.

BPS. 2003. *Statistik Daerah Provinsi Lampung*. BPS. Lampung.

Budiyono. 2003. Dasar-Dasar Geografi Sosial. (*Buku Ajar).* Universitas Lampung. Lampung.

Daldjoeni. 1997. *Masalah Penduduk Dalam Fakta dan Angka*. Alumni. Bandung.

Djohan Effendi. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000*. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Effendi, Sofian dan Chris Manning. 1989. Prinsip-prinsip Analisa Data, *Metode Penelitian Survai*. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ed. LP3ES. Jakarta.

Etta Mamamang S dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian.* Andi. Yogyakarta.

Eva Banowati. 2012. *Geografi Indonesia*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

Iwan Nugroho dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

Kartono, Wirosubarjo. 1995. *Kamus Istilah Demogarfi.* Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta.

Khairullah dan Cahyadin. 2006. *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa.* Sinar Grafika. Jakarta.

Koswara. 2002. *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Lutfi Muta'ali. 2013. *Pengembangan Wilayah Perdesaan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Ma'ruf, Moh. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006*. Mendagri. Jakarta.

_____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006*. Mendagri. Jakarta.

_____. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007*. Mendagri. Jakarta.

Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Moenir A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Moh. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mulyanto, H.R. 2008. *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Nawawi, Handari. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Nursid Sumaatmadja. 1981. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisis Keruangan*. Alumni. Bandung.

Pabundu Tika, Moh. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Robinson Tarigan. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara. Jakarta.

Rahardjo Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

_____. 2013. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Rasyid Pambudi. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.

Sitanala Arsyad. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Penerbit IPB Press. Bogor.

Soepartono. 2000. *Sarana dan Prasarana Olahraga*. Depdikbud. Jakarta.

Sigit Pudjianto. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016*. Kepala Biro Hukum. Jakarta.

Subarjo. 2003. Meteorologi dan Klimatologi (*Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Lampung.

Sudarno Eddi. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 21 Tahun 2011*. Pemda Pringsewu. Pringsewu.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta. Bandung.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Renika Cipta. Jakarta.

Sujamto. 1991. *Cakrawala Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sumadi. 2010. Perkembangan Pemikiran dan Kajian Geografi. (*Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Lampung.

Sumardjan. 1996. *Otonomi Desa.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suparmini dan Agustina Tri Wijayanti. 2015. Masyarakat Desa dan Kota. (*Buku Ajar)*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Suprapto Dibyosaputro. 1997. *Geomorfologi Dasar (Handout)*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta.

Suratman Woro. 2004. *Petunjuk Praktikum Evaluasi Kesesuai Lahan (Handout)*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta.

Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sutoro Eko. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* LIPI Press. Jakarta.

Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa.* Bumi Aksara. Jakarta.